



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 02 Februari 2021

Halaman: 5

PEMKOT SELURUH INDONESIA

Dana Kalurahan untuk Pemulihan Ekonomi

JETIS-Pemerintah kota (pemkot) seluruh Indonesia membahas dana kalurahan yang bisa dialokasikan untuk pemulihan ekonomi warga di tengah pandemi Covid-19.

Catur Dwi Janati
caturdwi.jogja.com

Dana Kalurahan menjadi salah satu aspek yang dibahas Apeksi tahun ini bersama pemulihan ekonomi.

Apeksi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung setiap langkah Pemerintah Pusat menanggapi pandemi Covid-19.

Hal itu dibahas dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Harper, Jalan Mangkubumi, Jogja, Senin (1/2).

Selain itu ada agenda pemilihan Ketua Komwil III Apeksi serta beberapa agenda soal arah pengembangan kota pun dibahas. Salah satunya penanganan Covid-19.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menjelaskan jika sebelumnya saat pra Musyawarah Nasional (Munas) Komwil III Apeksi sudah mengerucutkan beberapa isu yang diusulkan dalam tujuh poin pembahasan.

Dana Kalurahan menjadi salah satu aspek yang dibahas tahun ini bersama pemulihan ekonomi. "Dari tujuh poin salah satunya dana kalurahan, dana bagi hasil, pajak kendaraan bermotor, pilkada yang akan jadi pemikiran apakah tetap 2024 atau perubahan seperti halnya isu di tingkat nasional dan beberapa poin yang lainnya," jelasnya Senin.

Penanganan Covid-19 disebutkan Airin masih dibahas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dana kalurahan dinilai Airin bisa dimanfaatkan di 2021 untuk pemulihan ekonomi. "Dana insentif itu juga kami sangat berharap, karena mayoritas penduduk tinggal di wilayah perkotaan. Covid-19 itu rata-rata tertinggi di wilayah perkotaan dan tentunya dengan adanya dana kalurahan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pun juga insentif lainnya bisa mendorong pemulihan ekonomi," terangnya.

"Misalnya vaksin selesai di 2021-2022, maka recovery ke depannya yaitu untuk pemulihan ekobomi nasional menjadi skala prioritas di bidang UMKM dan beberapa program lainnya."

Wali Kota Jogja yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komwil III Apeksi 2017-2021, Haryadi Suyuti menerangkan jika kepala daerah dalam Apeksi memiliki struktur satuan tugas yang berbeda dengan Pemerintah Pusat dalam hal penanganan Covid-19. Haryadi mengatakan jika daerah tingkat dua membagi penanganan Covid-19 dalam tiga bagian yang dipegang oleh asisten.

"Saya sampaikan beberapa tambahan; di Apeksi ini ada kepala daerah, kami agak sedikit berbeda dengan Pusat, bahwa kendali satuan gugus tugas ini berada di kepala daerah, wali kota dengan tiga struktur di bawahnya," katanya.

Tiga struktur itu adalah khusus pencegahan, penanganan dan pemulihan ekonomi.

Mendukung Pusat

Haryadi menyebut Apeksi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung setiap langkah Pemerintah Pusat menanggapi pandemi Covid-19.

"Apeksi menggerakkan semua pemangku kepentingan, meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat agar dampak pandemi dapat teratasi secara tuntas. Namun, di saat yang sama juga berupaya melakukan pemulihan ekonomi agar segala aktivitas masyarakat dapat segera pulih kembali seperti sedia kala," katanya.

Wali Kota
Jogja Haryadi
Suyuti (kiri)
bersama Wali Kota
Tangerang Selatan
Airin Rachmi
Diany (tengah)
dalam Muskomwil
III Apeksi di Kota
Jogja, Senin (1/2).

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
Segera	☐ Untuk Diketahui
Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005